

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1 Kondisi Geografis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten menjelaskan tentang luas wilayah Provinsi Banten yaitu sebesar 9.662,92 km², secara Administratif Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon. Pada perkembangannya di wilayah Provinsi Banten terjadi pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kota Serang dari Kabupaten Serang (UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten) serta Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang (UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten).

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105°01'11"-106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50" - 07°01'01" Lintang Selatan, posisinya sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal.

Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl.

Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosaan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak, sebab sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten dibagi menjadi enam DAS, yaitu :

- DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);

- DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
- DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
- DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Teluklada, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Tata air permukaan untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas Provinsi meliputi CABT Serang – Tangerang dan CABT Jakarta.

Potensi dari masing-masing satuan cekungan air bawah tanah ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Labuan

CABT Labuan ini mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang ($\pm 93 \%$) dan Kabupaten Lebak ($\pm 7 \%$) dengan luas lebih kurang 797 km². Batas cekungan air bawah tanah di bagian barat adalah selat Sunda, bagian utara dan timur adalah batas pemisah air tanah dan di bagian selatan adalah batas tanpa aliran karena perbedaan sifat fisik batuan. Jumlah imbuhan air bawah tanah bebas (air bawah tanah pada lapisan akuifer tak tertekan/akuifer dangkal) yang berasal dari air hujan terhitung sekitar 515 juta m³/tahun. Sedang pada tipe air bawah tanah pada akuifer tertekan/akuifer dalam, terbentuk di daerah imbuhan yang terletak mulai elevasi di atas 75 m dpl sampai daerah puncak Gunung Condong, Gunung Pulosari dan Gunung Karang;

b. Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Rawadano

CABT Rawadano mencakup wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, dengan total luas cekungan lebih kurang 375 km². Batas satuan cekungan satuan air bawah tanah ini di bagian utara, timur dan selatan berupa batas pemisah air bawah tanah yang berimpit dengan batas air permukaan yang melewati Gunung Pasir Pematang Cibatuh (420

m), Gunung Ipis (550 m), Gunung Serengean (700 m), Gunung Pule (259 m), Gunung Kupak (350 m), Gunung Karang (1.778 m), Gunung Asepun (1.174 m) dan Gunung Malang (605 m). Sedang batas di bagian barat adalah Selat Sunda.

Berdasarkan perhitungan imbuhan air bawah tanah, menunjukkan intensitas air hujan yang turun dan membentuk air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sejumlah 180 juta m^3/tahun , sebagian diantaranya mengalir dari lereng Gunung Karang menuju Cagar Alam Rawadano sekitar 79 m^3/tahun . Sedang air bawah tanah yang berupa mata air pada unit akuifer vulkanik purna Danau yang dijumpai di sejumlah 115 lokasi menunjukkan total debit mencapai 2.185 m^3/tahun . Sementara itu pada unit akuifer vulkanik Danau pada 89 lokasi, mencapai debit 367 m^3/tahun . Total debit dari mata air keseluruhan sebesar 2.552 m^3/tahun ;

c. Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Serang – Cilegon

Satuan sub cekungan ini merupakan bagian dari CABT Serang – Tangerang, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah sekitar 1.200 km^2 . Batas satuan cekungan ini di bagian utara adalah laut Jawa, bagian timur adalah K.Ciujung, bagian selatan merupakan batas tanpa aliran dan bagian barat adalah Selat Sunda.

Dari hasil perhitungan neraca air menunjukkan jumlah imbuhan air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sebesar 518 juta m^3/tahun , sedang jumlah aliran air bawah tanah pada tipe lapisan akuifer tertekan sekitar 13 m^3/tahun , berasal dari daerah imbuhan yang terletak di sebelah utara dan barat daya yang mempunyai elevasi mulai sekitar 50 m dpl.

d. Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Tangerang

Satuan sub cekungan ini mencakup wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan sebagian Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), dengan total luas sekitar 1.850 km^2 . Batas sub cekungan ini di sebelah Utara adalah Laut Jawa, bagian timur adalah Kali Cisadane, bagian Selatan yang merupakan kontak dengan lapisan nir akuifer, serta bagian barat adalah Kali Ciujung.

Jumlah imbuhan air bawah tanah di seluruh sub CABT Tangerang sekitar 311 juta m³/tahun, sedangkan jumlah aliran air bawah tanah tertekan terhitung sekitar 0,9 juta m³/tahun.

Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Monson (Monson Trade) dan Gelombang La Nina atau El Nino. Saat musim penghujan (Nopember - Maret) cuaca didominasi oleh angin Barat (dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Pada Bulan Agustus cuaca didominasi oleh angin Timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang keras terutama di wilayah bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino. Temperatur di daerah pantai dan perbukitan berkisar antara 22° C dan 32° C, sedangkan suhu di pegunungan dengan ketinggian antara 400 – 1.350 m.dpl mencapai antara 18° C – 29° C.

Curah hujan tertinggi sebesar 2.712 – 3.670 mm pada musim penghujan bulan September – Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah barat dan curah 335 – 453 mm pada bulan September-Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Pada musim kemarau, curah hujan tertinggi sebesar 615 – 833 mm pada bulan April – Desember mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang, sedangkan curah hujan terendah pada musim kemarau sebanyak 360 – 486 mm pada bulan Juni – September mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah selatan dan 15% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara.

Kondisi kemiringan lahan di Provinsi Banten terbagi menjadi tiga kondisi yang ekstrim yaitu:

- a. Dataran yang sebagian besar terdapat di daerah Utara Provinsi Banten yang memiliki tingkat kemiringan lahan antara 0 – 15%, sehingga menjadi lahan yang sangat potensial untuk pengembangan seluruh jenis fungsi kegiatan. Dengan nilai kemiringan ini tidak diperlukan banyak perlakuan khusus terhadap lahan yang akan dibangun untuk proses prakonstruksi. Lahan dengan kemiringan ini biasanya tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yaitu di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang

hingga Kabupaten Lebak;

- b. Perbukitan landai-sedang (kemiringan $< 15\%$ dengan tekstrur bergelombang rendah-sedang) yang sebagian besar dataran landai terdapat di bagian utara meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian utara Kabupaten Pandeglang;
- c. Daerah perbukitan terjal (kemiringan $< 25\%$) terdapat di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.
- d. Perbedaan kondisi alamiah ini turut berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan pembangunan yang semakin tajam, yaitu wilayah sebelah utara memiliki peluang berkembang relatif lebih besar daripada wilayah sebelah Selatan.

Sumber daya tanah wilayah Provinsi Banten secara geografis terbagi dua tipe tanah yaitu: (a) kelompok tipe tanah sisa atau residu dan (b) kelompok tipe tanah hasil angkutan. Secara umum distribusi dari masing-masing tipe tanah ini di wilayah Provinsi Banten, terdapat di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Masing-masing tipe tanah yang terdapat di wilayah tersebut antara lain: 1. Aluvial pantai dan sungai; 2. Latosol; 3. Podsolik merah kuning; 4. Regosol; 5. Andosol; 6. Brown forest; 7. Glei.

Struktur geologi daerah Banten terdiri dari formasi batuan dengan tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200 – 800 meter dan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter. Formasi Bojongmanik merupakan satuan tertua berusia Miosen akhir, batuanannya terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasir, batu gamping, batu pasir tufaan, konglomerat dan breksi andesit, umurnya diduga Pliosen awal. Berikutnya adalah Formasi Cipacar yang terdiri dari tuf batu apung berselingan dengan lempung tufaan, konglomerat dan napal glaukonitan, umurnya diperkirakan Pliosen akhir. Di atas formasi ini adalah Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasir, lempung pasir, batu gamping kokina dan tuf.

Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan Alluvium yang berumur mulai Miosen awal hingga Resen, satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen.

Formasi Bayah terdiri dari tiga anggota yaitu Anggota Konglomerat, Batu Lempung dan Batu Gamping. Selanjutnya adalah Formasi Citaruruep, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimampang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan Formasi Cikotok.

Batuan Gunung Api dapat dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Plistosen Tua hingga Holosen. Batuan terobosan yang dijumpai bersusunan andesiot sampai basal. Tuf Cikasungka berumur Plistosen, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuartar. Pada peta lembar Leuwidamar disajikan pula singkapan batuan metamorf yang diduga berumur Ologo Miosen terdiri dari Sekis, Genes dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Dorit Kuarsa berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit berumur Miosen akhir serta Basal berumur kuartar. Batuan endapan termuda adalah aluuium dan endapan pantai yang berupa Kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang kerangan, gosong pantai dan gamping terumbu.

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari empat wilayah kabupaten dan empat kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 km²), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km²), Kabupaten Serang (1.734,28 km²), Kota Tangerang (153,93 km²), Kota Cilegon (175,50 km²), Kota Serang (266,71 km²), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km²).

Adapun jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten adalah sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Kabupaten				
1. Pandeglang	2.746,89	35	287	52
2. Lebak	3.426,56	28	318	27
3. Tangerang	1.011,86	29	86	188
4. Serang	1.734,28	29	254	72
Kota				
1. Tangerang	153,93	13	-	104
2. Cilegon	175,50	8	4	39
3. Serang	266,71	6	30	37
4. Tangerang Selatan	147,19	7	-	54
Banten	9.662,92	155	979	573

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Provinsi Banten terbagi menjadi 8 (delapan) wilayah administrasi yaitu 4 (empat) pemerintah kabupaten dan 4 (empat) pemerintah kota, 155 (seratus lima puluh lima) kecamatan, 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) desa dan 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) kelurahan. Luas keseluruhan Provinsi Banten adalah 9.662,92 Km² (sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua kilometer persegi).

Pemerintah Kabupaten terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Serang. Sedangkan pemerintah kota terdiri dari Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki luas wilayah 2.746,89 Km² (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan kilometer persegi), terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kecamatan, 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) desa dan 52 (lima puluh dua) kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 3.426,56 Km² (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima puluh enam kilometer persegi), terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan, 318 (tiga ratus delapan belas) desa dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki luas wilayah 1.011,86 Km² (seribu sebelas koma delapan puluh enam kilometer persegi), terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 188 (seratus delapan puluh delapan) desa dan 86 (delapan puluh enam) kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Serang memiliki luas wilayah 1.734,28 Km² (seribu tujuh ratus tiga puluh empat koma dua puluh delapan kilometer persegi), terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 254 (tiga ratus dua puluh enam) desa, dan 72 (tujuh puluh dua) kelurahan.

Pemerintah Kota Tangerang memiliki luas wilayah 153,93 Km² (seratus lima puluh tiga koma sembilan puluh tiga kilometer persegi), terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, tanpa ada pemerintah desa, dan 104 (seratus empat) kelurahan.

Pemerintah Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,50 Km² (seratus tujuh puluh lima koma lima puluh kilometer persegi), terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, 4 (empat) desa, dan 43 (empat puluh tiga) kelurahan.

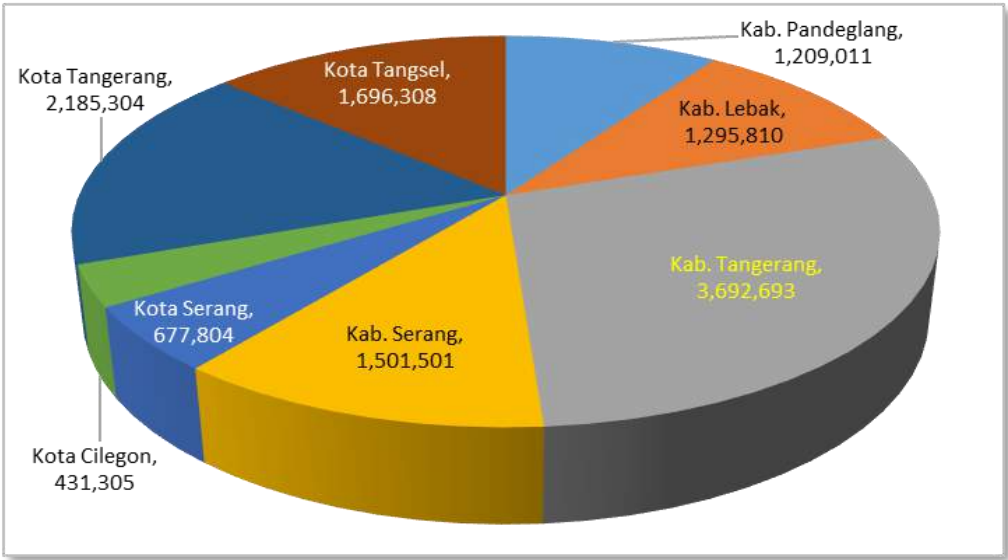
Pemerintah Kota Serang memiliki luas wilayah 266,71 Km² (dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu kilometer persegi), terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 30 (tiga puluh) desa, dan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah 147,19 Km² (seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh satu kilometer persegi), terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, tanpa ada pemerintah desa, dan 54 (lima puluh empat) kelurahan.

Secara keseluruhan luas Provinsi Banten adalah 9.662,92 Km² (sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua kilometer persegi) terbagi atas 155 (seratus lima puluh lima) kecamatan, 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) desa dan 313 (tiga ratus tiga belas) kelurahan.

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2018 sebanyak 12.689.736 jiwa yang terdiri atas 6.465.282 jiwa penduduk laki-laki dan 6.224.454 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,17 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,87. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2018 mencapai 1.313 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 14.197 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 378 jiwa/Km².

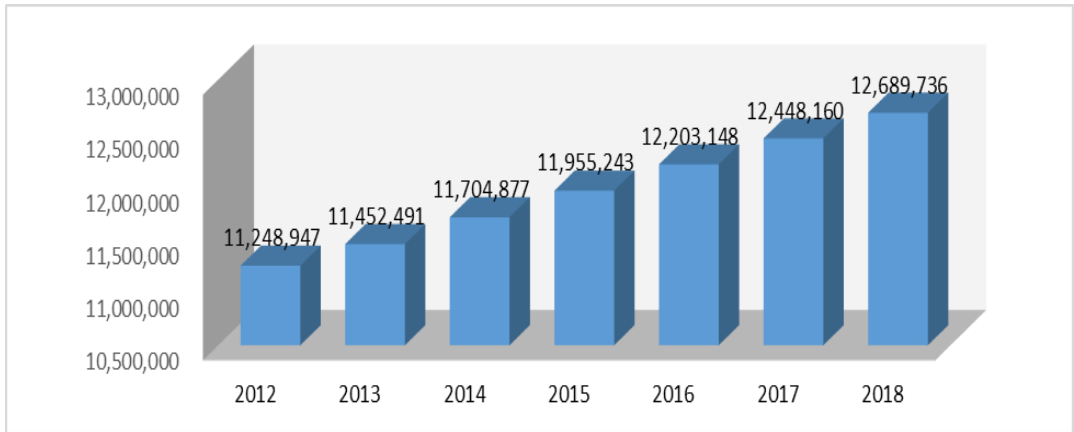


Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.2
Sebaran Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2018

Menurut data SIPD tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Banten tersebar pada 8 (delapan) kabupaten kota dengan sebaran sebagai berikut : Jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjumlah 1.295.810 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh) jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berjumlah 1.209.011 (satu juta dua ratus sembilan ribu sebelas) jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Serang berjumlah 1.501.501 (satu juta lima ratus seribu limaratus satu) jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.692.693 (tiga juta enam ratus

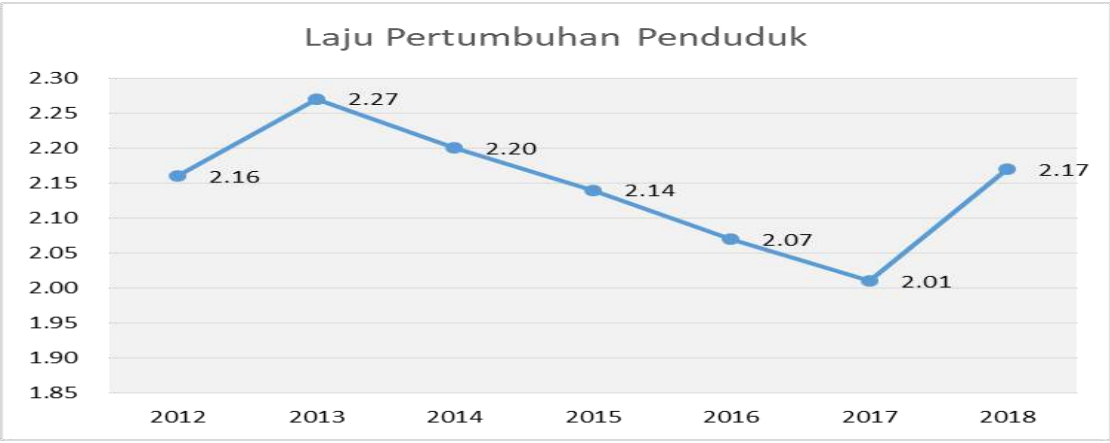
sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga) jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang berjumlah 2.185.304 (dua juta seratus delapan puluh lima tiga ratus empat) jiwa; jumlah penduduk Kota Cilegon berjumlah 431.305 (empat ratus dua puluh lima ribu seratus tiga) jiwa; jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 677.804 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.696.308 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) jiwa.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.3
Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2012-2018

Data pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten tahun 2012 sampai dengan 2017 menurut data SIPD Provinsi Banten 2018 sebagai berikut : Tahun 2012 berjumlah 11.248.947 (sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) jiwa. Tahun 2013 berjumlah 11.452.491 (sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu) jiwa. Tahun 2014 berjumlah 11.704.877 (sebelas juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) jiwa. Tahun 2015 berjumlah 11.955.243 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga) jiwa. Tahun 2016 berjumlah 12.203.148 (dua belas juta dua ratus tiga ribu seratus empat puluh delapan) jiwa. Tahun 2017 berjumlah 12.448.160 (dua belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh) jiwa. Tahun 2018 berjumlah 12.689.736 (dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) jiwa.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

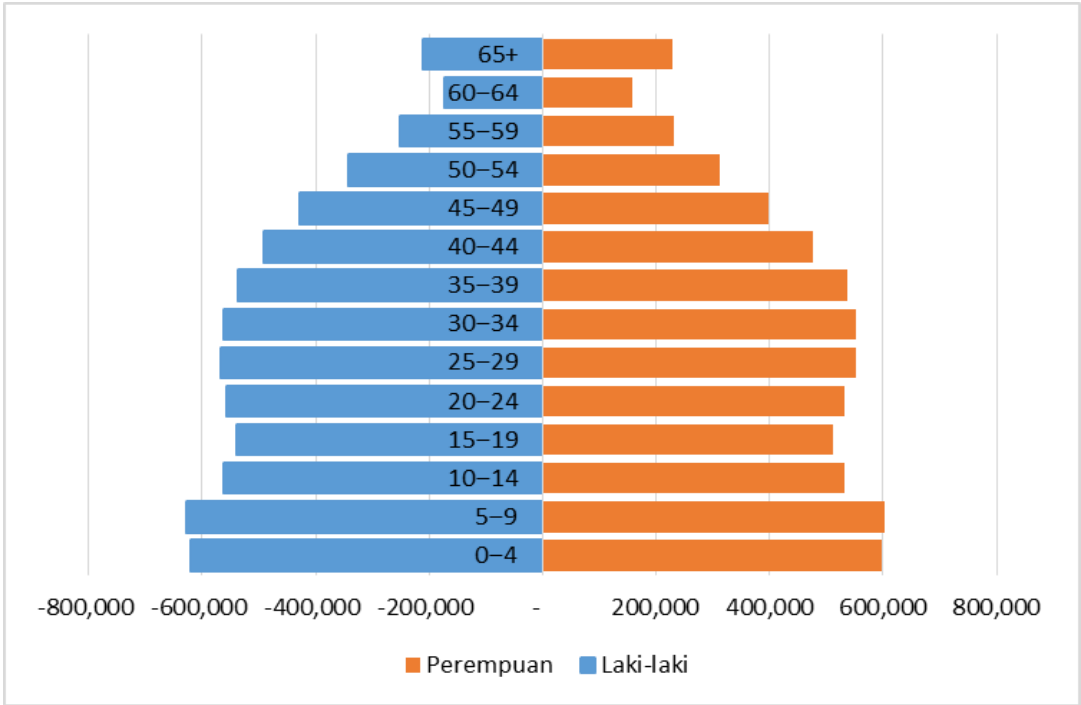
Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2012-2018

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun 2012-2018 menurut data SIPD Provinsi Banten 2018 adalah sebagai berikut : Tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,16% artinya pada tahun 2012 setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah 2,16 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari wilayah luar Banten; tahun 2013 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,27 % artinya pada tahun 2013 setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah 2,27 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar Banten. Tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten sebesar 2,20 % artinya pada tahun 2014 setiap 100 (seratus) penduduk Banten akan bertambah 2,20 jiwa dari kelahiran dan migrasi penduduk dari luar Banten. Laju pertumbuhan Provinsi Banten tahun 2015 sebesar 2,14 % artinya pada tahun 2015 setiap 100 (seratus) penduduk Banten akan bertambah sebesar 2,14 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar wilayah Banten. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun 2016 sebesar 2,06% artinya pada tahun 2016 setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah 2,06 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar wilayah Banten. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun 2017 sebesar 2,01% artinya pada tahun 2017 setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah sebesar 2,01 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar Banten. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun 2018 sebesar 2,17% artinya pada tahun 2017 setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah sebesar 2,17 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar Banten.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2018

Kelompok Umur	2017		2018	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0-4	622,837	600,223	620,242	597,557
5-9	617,763	588,994	627,920	601,742
10-14	550,266	522,472	562,671	533,395
15-19	540,496	511,736	538,628	511,201
20-24	552,845	530,707	556,461	531,509
25-29	563,413	550,639	565,994	551,885
30-34	555,086	549,982	560,890	552,958
35-39	527,362	525,919	536,731	536,365
40-44	480,235	462,264	491,866	477,190
45-49	411,962	381,741	426,814	398,577
50-54	324,448	297,029	340,844	312,734
55-59	239,113	218,599	252,334	232,475
60-64	162,105	145,480	173,709	157,744
65+	196,497	217,947	210,178	229,122

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.5
Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin Provinsi Banten Tahun 2018

Pada tahun 2015, sebagian besar penduduk Banten tercatat sebagai penganut agama Islam yaitu sebanyak 92,55 persen, diikuti dengan penganut agama Budha sebanyak 3,60 persen, Kristen Protestan 1,50 persen, Katholik 1,40 persen, Hindu 0,09 persen, dan Khong Hu Cu 0,03 persen. Sebagai sarana ibadah, di Provinsi Banten terdapat 8.137 masjid, 14.574 mushola, 838 gereja Protestan, 14 gereja Katholik, 12 pura, 115 wihara dan 9 kelenteng.

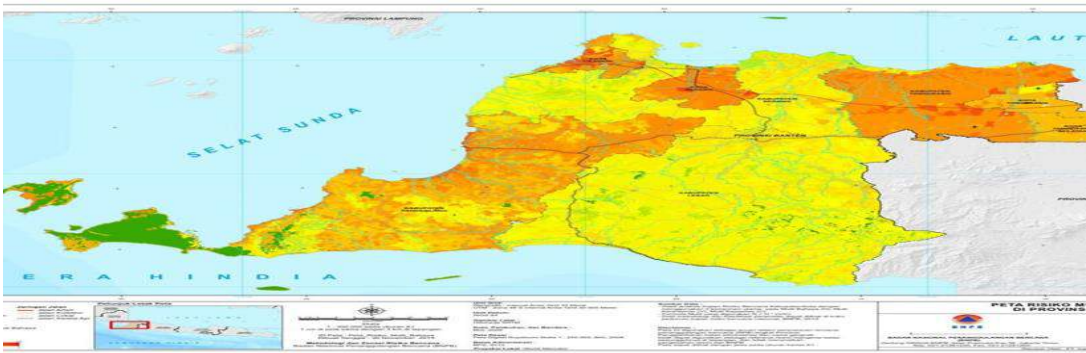
Tabel 2.3
Penduduk Provinsi Banten Menurut Agama yang dianut Tahun 2015

Agama	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
Banten	9.730.51	162.83	145.5	91.99	380.394	2.949

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah dengan kondisi wilayahnya rentan dan berpotensi terhadap bencana. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Rang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 kawasan rawan bencana tersebut meliputi rawan banjir, rawan tsunami, rawan gempa bumi, rawan kebakaran hutan dan lahan, rawan cuaca ekstrim, angin topan dan puting beliung, rawan tanah longsor, rawan kekeringan dan rawan gagal teknologi. Sedangkan potensi rawan bencana yang disebabkan nonalam/sosial selain gagal teknologi adalah gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, konflik sosial dan teror yang frekuensinya masih relatif kecil.



Gambar 2.6
Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Banten
(Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten 2016-2020)

Potensi bencana Provinsi Banten dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Rangkuman kelas indeks bahaya keseluruhan bencana yang berpotensi di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Potensi Luas Bahaya di Provinsi Banten

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	475.652	TINGGI
2	Banjir Bandang	17.647	TINGGI
3	Cuaca Ekstrim	786.755	SEDANG
4	Epidemi dan Wabah Penyakit	42.619	RENDAH
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	15.545	TINGGI
6	Gempabumi	931.899	TINGGI
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	176.996	TINGGI
8	Kegagalan Teknologi	20.634	TINGGI
9	Kekeringan	931.903	SEDANG
10	Tanah Longsor	151.858	TINGGI
11	Tsunami	34.854	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Banten 2016-2020

Tabel di atas menggambarkan potensi bencana di Provinsi Banten rata-rata berada pada kelas tinggi. Bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, tanah longsor, tsunami dikatakan memiliki kelas bahaya tinggi. Bencana lainnya adalah cuaca ekstrim dan kekeringan memiliki kelas bahaya sedang, sedangkan bencana epidemi dan wabah penyakit memiliki kelas bahaya rendah.

Potensi ancaman bencana dari pengkajian kelas indeks sampai pada tingkat kabupaten/kota dijabarkan untuk setiap bencana, seperti berikut :

1. **Banjir**

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai, atau pecahnya bendungan. Bencana banjir termasuk bencana yang sering terjadi di Indonesia dan beberapa wilayah bagiannya, termasuk Provinsi Banten. Bencana tersebut dapat berpotensi terjadi beberapa wilayah didukung oleh kondisi wilayah yang rentan.

Perhitungan potensi bahaya banjir dilihat berdasarkan parameter-parameter standar ukur, yaitu daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya banjir di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	155.038	TINGGI
2	Lebak	57.919	TINGGI
3	Tangerang	101.186	TINGGI
4	Serang	98.869	TINGGI
5	Tangerang	15.393	TINGGI
6	Cilegon	9.682	TINGGI
7	Serang	22.846	TINGGI
8	Tangerang Selatan	14.719	SEDANG
PROVINSI BANTEN		475.652	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya banjir Provinsi Banten memiliki 475.652 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya banjir adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

2. Kekeringan

Perhitungan potensi bahaya kekeringan dilihat berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana. Dalam pedoman tersebut, dimuat parameter sebagai alat ukur untuk setiap bencana. Parameter untuk bahaya meteorologi (Indeks Presipitasi Terstandarisasi). Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Provinsi Banten seperti tabel berikut.

Tabel 2.6
Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	274.689	SEDANG
2	Lebak	335.120	SEDANG
3	Tangerang	101.186	SEDANG
4	Serang	147.658	SEDANG
5	Tangerang	15.393	SEDANG
6	Cilegon	16.467	RENDAH
7	Serang	26.671	SEDANG
8	Tangerang Selatan	14.719	SEDANG
PROVINSI BANTEN		931.903	SEDANG

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kekeringan Provinsi Banten memiliki 931.903 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kekeringan adalah sedang. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

3. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Bencana cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Oleh karena itu, perhitungan potensi bahaya cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter di atas, diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	195.138	SEDANG
2	Lebak	280.879	SEDANG
3	Tangerang	101.186	SEDANG
4	Serang	136.949	SEDANG
5	Tangerang	15.393	SEDANG
6	Cilegon	15.830	SEDANG
7	Serang	26.661	SEDANG
8	Tangerang Selatan	14.719	SEDANG
PROVINSI BANTEN		786.755	SEDANG

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya cuaca ekstrim Provinsi Banten memiliki 786.755 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya cuaca ekstrim adalah sedang. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

4. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah.

Dalam pengkajian indeks bahaya, bencana tanah longsor dapat dilihat berpotensi berdasarkan parameter zona kerentanan gerakan tanah (PVMBG) dan kemiringan lereng (di atas 15%).

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	29.423	TINGGI
2	Lebak	98.515	TINGGI
3	Serang	19.022	TINGGI
4	Tangerang	11	RENDAH
5	Cilegon	3.871	SEDANG
PROVINSI BANTEN		151.858	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya tanah longsor Provinsi Banten memiliki 151.858 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya tanah longsor adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak.

5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim dan abrasi umumnya terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transpor sedimen dalam arah tegak lurus di sepanjang pantai. Angin yang bertiup dengan kecepatan dan arah tertentu di permukaan laut akan menimbulkan riakan (gerakan) air yang semula kecil menjadi

besar dan kemudian menjadi gelombang. Energi gelombang yang datang tegak lurus dari arah utara pantai mengikis kawasan tersebut sehingga menimbulkan abrasi yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perubahan garis pantai. Oleh karena itu, gelombang ekstrim dan abrasi memiliki kerentanan untuk beberapa wilayah yang berada di pinggir pantai.

Perhitungan potensi bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi dilihat berdasarkan parameter tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya gelombang esktrim dan abrasi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim dan Abrasi di Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	9.077	TINGGI
2	Lebak	1.702	TINGGI
3	Tangerang	1.156	SEDANG
4	Serang	2.584	SEDANG
5	Cilegon	812	SEDANG
6	Serang	214	SEDANG
PROVINSI BANTEN		15.545	TINGGI

Sumber : *Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)*

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya gelombang esktrim dan abrasi Provinsi Banten memiliki 15.545 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya gelombang esktrim dan abrasi adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak.

6. Gempabumi

Bencana gempabumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor geologi. Gempabumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Perhitungan potensi bahaya gempabumi dilihat berdasarkan parameter dasar pengkajian risiko bencana, yaitu kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar, intensitas guncangan di permukaan.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	274.689	TINGGI
2	Lebak	335.120	TINGGI
3	Tangerang	101.186	SEDANG
4	Serang	147.656	SEDANG
5	Tangerang	15.393	SEDANG
6	Cilegon	16.465	SEDANG
7	Serang	26.671	SEDANG
8	Tangerang Selatan	14.719	SEDANG
PROVINSI BANTEN		931.899	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya gempabumi Provinsi Banten memiliki 931.889 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya gempabumi adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

7. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Berdasarkan kondisi daerah Provinsi Banten, maka berpotensi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan parameter jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	95.658	SEDANG
2	Lebak	70.230	SEDANG
3	Tangerang	212	SEDANG
4	Serang	10.511	TINGGI
5	Cilegon	355	TINGGI
6	Serang	30	SEDANG
PROVINSI BANTEN		176.996	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Banten memiliki 176.996 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

8. Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan bencana baru dalam pengkajian risiko bencana. Penambahan pengkajian bencana banjir bandang disesuaikan dengan kerangka acuan kerja dari BNPB. Dalam pengkajian potensi bahaya, parameter bahaya banjir bandang dikaji berdasarkan parameter sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi). Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	2.173	TINGGI
2	Lebak	11.645	TINGGI
3	Tangerang	400	TINGGI
4	Serang	3.160	TINGGI
5	Tangerang	75	TINGGI
6	Tangerang Selatan	194	TINGGI
PROVINSI BANTEN		17.647	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya banjir bandang Provinsi Banten memiliki 17.647 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya banjir bandang adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak.

9. Epidemi dan Wabah Penyakit

Perhitungan potensi bahaya bencana epidemi dan wabah penyakit dilihat berdasarkan Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Berdasarkan aturan tersebut, disusun pengkajian potensi bahaya berdasarkan parameter-parameter sebagai alat ukurnya. Parameter tersebut adalah kepadatan penduduk penderita campak, kepadatan penduduk penderita malaria, kepadatan penduduk penderita demam berdarah, kepadatan penduduk penderita HIV/AIDS, dan kepadatan penduduk. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit
di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	4.483	RENDAH
2	Lebak	1.089	RENDAH
3	Tangerang	28.200	RENDAH
4	Serang	3.154	RENDAH
5	Tangerang	892	RENDAH
6	Cilegon	1.841	RENDAH
7	Serang	1.004	RENDAH
8	Tangerang Selatan	1.956	RENDAH
PROVINSI BANTEN		42.619	RENDAH

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit Provinsi Banten memiliki 42.619 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya epidemi dan wabah penyakit adalah rendah. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

10. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan semua kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Pengelolaan teknologi tinggi yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak kegagalan ataupun kecelakaan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Pengkajian potensi bahaya kegagalan teknologi disusun berdasarkan parameter-parameter sebagai alat ukurnya. Perhitungan potensi bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter kapasitas industri dan jenis industri: manufaktur (logam) dan kimia.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Tangerang	8.275	TINGGI
2	Serang	4.746	TINGGI
3	Tangerang	1.692	TINGGI
4	Cilegon	4.605	TINGGI
5	Serang	857	TINGGI
6	Tangerang Selatan	459	SEDANG
7	Tangerang	8.275	TINGGI
8	Serang	4.746	TINGGI
PROVINSI BANTEN		20.634	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kegagalan teknologi Provinsi Banten memiliki 20.634 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kegagalan teknologi adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

11. Tsunami

Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempabumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitude lebih dari 7 SR. Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut. Perhitungan potensi bahaya tsunami dilihat berdasarkan parameter adalah ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng, dan kekasaran permukaan.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya tsunami di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	13.445	TINGGI
2	Lebak	2.672	TINGGI
3	Tangerang	8.227	SEDANG
4	Serang	8.296	TINGGI
5	Cilegon	1.024	TINGGI
6	Serang	1.190	RENDAH
PROVINSI BANTEN		34.854	TINGGI

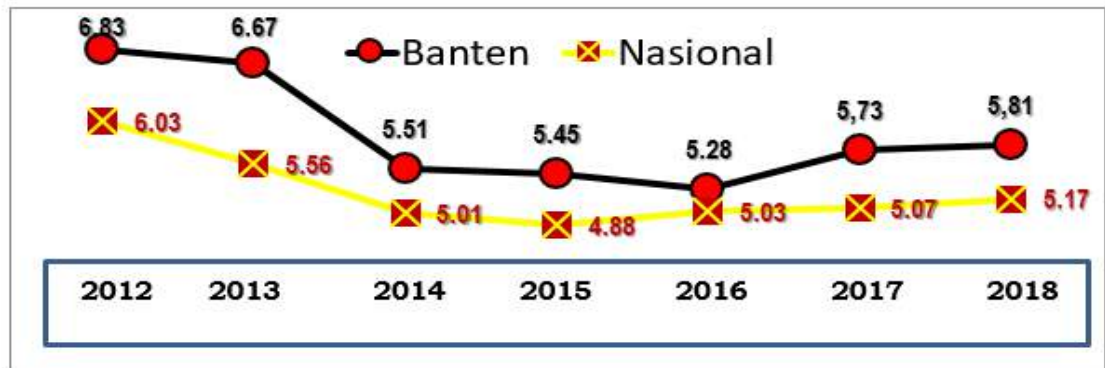
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya tsunami Provinsi Banten memiliki 34.854 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya tsunami adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan usaha di Provinsi Banten.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2012-2018 (Tw IV)

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, kelompok lapangan usaha sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian. Kelompok usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.

Apabila dilihat menurut lapangan usahanya, pada tahun 2017, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi sebesar 31,88 persen, kemudian disusul lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 12,33 persen. Selanjutnya lapangan usaha Kontruksi menyumbang 10,41 persen dan lapangan usaha real estat memberikan sumbangan sebesar 7,42 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 37,96 persen.

Struktur perekonomian Banten menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (31,20 persen); Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,49 persen); dan Transportasi dan Pergudangan (11,08 persen).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Banten terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.8
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Provinsi Banten (Milyar Rupiah) 2014-2018

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.456,95	20.743,47	22.108,75	23.054,69	23.879,78
B. Pertambangan dan Penggalian	2.677,28	2.775,25	2.870,48	2.850,85	2.871,46
C. Industri Pengolahan	130.305,90	134.907,47	139.073,54	144.219,15	149.425,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.399,17	4.338,09	4.158,64	4.179,58	4.480,41
E. Pengadaan Air	329,28	346,29	369,93	396,92	416,26
F. Konstruksi	31.636,47	34.153,90	36.307,71	39.224,02	42.241,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47.249,36	49.575,36	51.486,46	54.651,24	58.613,53
H. Transportasi dan Pergudangan	21.908,32	23.348,64	25.133,93	27.289,08	29.293,61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.006,95	8.520,04	9.165,73	9.924,70	10.664,18
J. Informasi dan Komunikasi	18.119,06	19.782,89	21.373,06	23.173,72	24.998,29
K. Jasa Keuangan	9.351,26	10.136,57	11.587,60	12.037,90	12.873,62
L. Real Estate	27.697,29	29.687,73	32.003,54	34.538,74	37.260,63
M,N. Jasa Perusahaan	3.346,88	3.607,27	3.875,63	4.182,02	4.458,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.970,70	6.361,71	6.813,81	7.140,46	7.517,97
P. Jasa Pendidikan	9.979,68	10.647,51	11.354,62	12.197,11	13.103,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.020,47	4.228,76	4.542,71	4.912,96	5.249,40
R,S,T,U. Jasa lainnya	4.896,20	5.216,25	5.608,94	6.072,79	6.535,99
PDRB	349.351,23	368.377,20	387.835,09	410.045,92	433.884,32

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.17
 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan
 Usaha (Persen) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,45	6,61	6,58	4,28	3,58
B. Pertambangan dan Penggalian	3,96	3,66	3,43	-0,68	0,72
C. Industri Pengolahan	1,70	3,53	3,09	3,70	3,61
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,26	-1,39	-4,14	0,50	7,20
E. Pengadaan Air	7,15	5,16	6,83	7,30	4,87
F. Konstruksi	11,46	7,96	6,31	8,03	7,69
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,04	4,92	3,85	6,15	7,25
H. Transportasi dan Pergudangan	5,42	6,57	7,65	8,57	7,35
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,83	6,41	7,58	8,28	7,45
J. Informasi dan Komunikasi	18,71	9,18	8,04	8,42	7,87
K. Jasa Keuangan	4,75	8,40	14,31	3,89	6,94
L. Real Estate	8,42	7,19	7,80	7,92	7,88
M,N. Jasa Perusahaan	8,78	7,78	7,44	7,91	6,62
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,18	6,55	7,11	4,79	5,29
P. Jasa Pendidikan	7,57	6,69	6,64	7,42	7,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,34	5,18	7,42	8,15	6,85
R,S,T,U. Jasa lainnya	7,49	6,54	7,53	8,27	7,63
PDRB	5,51	5,45	5,28	5,73	5,81

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.18
 Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010
 (Persen) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha PDRB	Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,82	5,87	6,02	5,90	5,78
B. Pertambangan dan Penggalian	0,87	0,81	0,79	0,74	0,69
C. Industri Pengolahan	34,70	33,52	32,57	31,93	31,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,57	2,70	2,32	2,13	2,08
E. Pengadaan Air	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	9,77	9,96	10,12	10,30	10,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,53	12,37	12,18	12,29	12,49
H. Transportasi dan Pergudangan	9,19	10,14	10,70	10,87	11,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,33	2,34	2,37	2,39	2,38
J. Informasi dan Komunikasi	3,64	3,51	3,53	3,64	3,53
K. Jasa Keuangan	2,78	2,79	3,04	3,03	3,08
L. Real Estate	6,95	7,07	7,22	7,47	7,62
M,N. Jasa Perusahaan	0,99	1,02	1,05	1,08	1,09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,93	1,98	2,04	2,03	2
P. Jasa Pendidikan	3,17	3,17	3,23	3,31	3,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,13	1,15	1,18	1,21
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,54	1,55	1,57	1,62	1,63
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.19
 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota
 (Juta Rupiah) Tahun 2014-2017

Wilayah	PDRB (Rp)			
	2014	2015	2016	2017
Pandeglang	15,097,104.74	15,974,129.39	16,856,468.51	17,876,027.09
Lebak	15,756,246.97	16,733,237.57	17,716,138.88	18,788,268.35
Tangerang	73,828,384.71	77,962,945.83	82,139,044.21	86,937,312.91
Serang	42,300,934.77	44,454,582.21	46,719,819.27	49,154,271.36
Kota Tangerang	86,183,522.76	90,807,569.45	95,631,145.01	101,280,309.33
Kota Cilegon	57,261,922.79	59,982,731.73	63,014,416.12	66,534,357.56
Kota Serang	16,745,083.89	17,808,478.25	18,926,545.83	20,139,187.38
Kota Tangsel	42,411,467.14	45,485,613.63	48,602,863.79	52,213,998.57
BANTEN	349,351,227.66	368,377,203.02	387,824,352.75	409,959,694.09

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.2.2 Laju Inflasi

Berdasarkan berita resmi Statistik BPS Provinsi Banten yang dirilis pada tanggal 2 Januari 2019 menyatakan bulan desember tahun 2018, harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 142,31 pada bulan November menjadi 143,20 pada bulan Desember atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,63 persen.

Enam dari tujuh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks, yaitu berturut-turut: kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks sebesar 1,78 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,94 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik sebesar 0,37 persen, kelompok kesehatan naik sebesar 0,14 persen, kelompok sandang naik sebesar 0,13 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,02 persen sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami penurunan sebesar -0,04 persen.

Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Desember ini adalah angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah dan cabai merah. Laju inflasi tahun kalender dan inflasi “Year on Year” (IHK Desember 2018 terhadap Desember 2017) tercatat sebesar 3,42 persen.

Tabel 2.20
IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Desember 2018 (2017= 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2017	IHK Nopember 2018	IHK Desember 2018	Inflasi Desember 2018 *)	Laju Inflasi Tahun 2018 **)	Inflasi “Year on Year” **)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
U M U M	138,47	142,31	143,20	0,63	3,42	3,42
1. Bahan Makanan	148,93	149,75	152,41	1,78	2,34	2,34
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	153,88	157,32	157,89	0,37	2,60	2,60
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	130,14	135,04	135,06	0,02	3,78	3,78
4. Sandang	114,64	119,19	119,35	0,13	4,11	4,11
5. Kesehatan	135,57	143,92	144,11	0,14	6,30	6,30
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	136,08	142,34	142,29	-0,04	4,57	4,57
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	130,96	134,08	135,34	0,94	3,35	3,35

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.9
Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Banten Tahun 2014-2018

2.2.3 PDRB Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada Tahun 2017, secara agregat PDRB per kapita Banten mencapai mencapai 45.342.376,40 juta rupiah atau senilai US\$ 3,233.43, meningkat 5,73 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 42,470,297.23 juta rupiah (US\$ 3,266.95). Peningkatan tersebut, lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya selama periode 2014-2015 berturut-turut sebesar 11,30 persen dan 9,28 persen.

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Apabila diperhatikan perkembangan daya beli masyarakat yang diasumsikan setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang dikoreksi oleh angka inflasi, maka daya beli masyarakat di Banten pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,76 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 4,98 persen. Kondisi perubahan daya beli dalam periode tahun 2012- 2016 fluktuatif dengan rentang 5 persen.

Tabel 2.21
PDRB Perkapita Tahun 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015*	2016**
PDRB per Kapita (Juta Rp)	30,20	32,99	36,63	40,03	42,31
PDRB per Kapita (US \$)	3.214,85	3.154,77	3,085,95	2,988,64	3,179,83
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100)	118,92	129,90	144,22	157,60	166,59
Pertumbuhan PDRB per Kapita	7,95	9,23	11.03	9,28	5,70
Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara					

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.22
PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/(Rupiah) 2012-2017

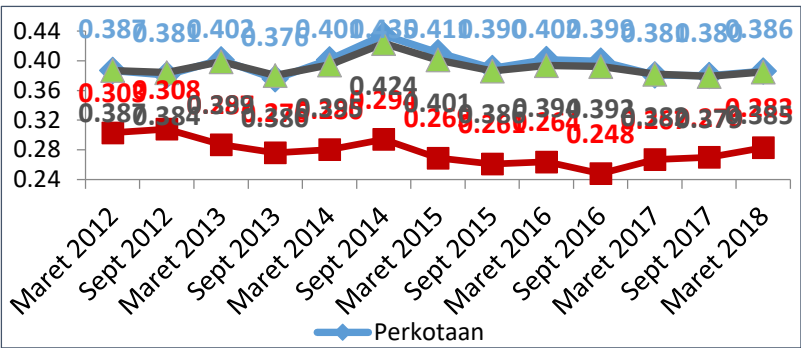
Wilayah	PDRB Per Kapita (Rp)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 Pandeglang	12,887,168.08	13,900,103.54	15,317,815.93	17,028,467.00	18,481,047.53	20,225,700.22
02 Lebak	12,239,703.77	13,416,112.11	14,765,720.77	16,279,741.41	17,676,916.60	19,214,831.95
03 Tangerang	23,662,041.75	25,514,935.14	27,999,002.57	30,160,683.84	31,443,263.94	33,277,805.72
04 Serang	29,240,909.81	31,685,494.20	35,077,025.86	38,124,015.53	41,020,521.53	44,221,583.65
71 Kota Tangerang	43,919,046.02	48,433,319.89	54,980,937.05	60,891,275.08	65,001,733.08	69,826,157.74
72 Kota Cilegon	141,650,612.05	155,024,561.93	172,091,926.65	186,985,703.61	195,975,954.64	209,695,821.29
73 Kota Serang	25,575,823.32	28,203,885.22	31,148,320.22	34,058,115.95	36,690,997.41	39,727,941.32
74 Kota Tangsel	28,020,186.07	30,723,741.42	33,539,279.37	36,441,854.63	38,503,578.29	41,532,733.05
BANTEN	30,202,440.50	32,991,607.00	36,629,181.91	40,091,233.92	42,470,297.23	45,342,376.40

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.2.4 Indeks Gini Rasio dan Analisa Ketimpangan

Ketimpangan pendapatan penduduk masih cukup tinggi seiring dengan meningkatnya pengeluaran masyarakat dalam setahun terakhir. Kesimpulan itu didapat berdasarkan hasil perhitungan koefisien gini (gini ratio) yang Tahun 2018 sebesar 0,385 dan tahun 2017 sebesar 0,379 walaupun pada penurunan tahun 2014 sebesar 0,35.

Sekadar informasi, koefisien gini dibagi menjadi tiga indikator, yakni kurang dari 0,3 persen menunjukkan ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 persen menunjukan ketimpangan tingkat menengah, dan lebih dari 0,5 persen menunjukkan ketimpangan tinggi. Statistik menunjukkan, penurunan gini ratio terbesar terjadi di perkotaan, yakni sebesar 0,018 poin dari 0,428 pada Maret 2015 menjadi 0,410. Sedangkan di pedesaan, gini rasio juga turun sebesar 0,007 poin dari 0,334 menjadi 0,327.



Sumber SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.10
Perkembangan *Gini Ratio* Banten, Maret 2012–Maret 2018

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan juga bisa dilihat dari tingkat pengeluaran masyarakat. Indikator ketimpangan pengeluaran dilihat dari tingkat pengeluaran 40 persen terbawah dari setiap kelompok masyarakat, yakni kelompok berpenghasilan rendah, sedang dan tinggi. Penilaiannya berkebalikan dari koefisien gini, di mana semakin tinggi nilai semakin rendah ketimpang dan sebaliknya.

Ketimpangan tinggi terjadi jika persentase pengeluaran 40 persen masyarakat di bawah 12 persen. Sedangkan untuk kisaran 12-17 persen masuk kategori sedang, dan di atas 17 persen menunjukkan ketimpangan yang rendah. Kendati foefisien gini di perkotaan turun paling besar, namun ketimpangan pengeluaran di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Ukuran Bank Dunia juga menunjukkan hal yang sama, yaitu di perkotaan tergolong ketimpangan sedang atau di bawah 17 persen sementara di perdesaan tergolong ketimpangan rendah di atas 17 persen.

Tabel 2.23
Indeks *Gini Ratio* di Provinsi Banten Tahun 2012 -2018

Wilayah Provinsi	Indeks Gini						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Banten	0,384	0,38	0,424	0,386	0,392	0,379	0,385

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

2.2.5 Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2018 mencapai 5,24 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada September 2017 (5,59 persen). Dalam kurun waktu enam bulan terjadi penurunan sebesar 0,35 poin. Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 4,69 menjadi 4,38 dan persentase penduduk miskin di perdesaan turun dari 7,81 pada September 2017 menjadi 7,33 pada Maret 2018. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama berkurang sebanyak 38,47 ribu orang dari 699,83 ribu orang pada September 2017 menjadi 661,36 ribu orang pada bulan Maret 2018.

Tabel 2.24
Perkembangan Tingkat KemiskinanProvinsi Banten Tahun 2018

Daerah	Bulan/ Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan	Sept. 2017	415,67	4,69
	Maret 2018	393,80	4,38
Pedesaan	Sept. 2017	284,16	7,81
	Maret 2018	267,55	7,33
Perkotaan + pedesaan	Sept. 2017	699,83	5,59
	Maret 2018	661,36	5,24

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Banten mencapai 661,36 ribu orang (5,24 persen), berkurang sebanyak 38,47 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 699,83 ribu orang (5,59 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 4,69 persen turun menjadi 4,38 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 7,81 persen turun menjadi 7,33 persen pada Maret 2018.

Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 21,87 ribu orang (dari 415,67 ribu orang pada September 2017 menjadi 393,80 ribu orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 16,61 ribu orang (dari 284,16 ribu orang pada September 2017 menjadi 267,55 ribu orang pada Maret 2018).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 71,66 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 70,92 persen

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan Maret 2018 di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, kopi bubuk dan kopi instan (sachet) serta roti. Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Tabel 2.25
 Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Pandeglang	9,28	10,25	9,5	10.43	9.67	9.74
Kab Lebak	8,63	9,5	9,17	9.97	8.71	8.64
Kab Tangerang	5,71	5,78	5,26	5.71	5.29	5.39
Kab Serang	5,28	5,02	4,87	5.09	5.29	4.63
Kota Tangerang	5,56	5,26	4,91	5.04	4.94	4.95
Kota Cilegon	3,82	3,99	3,81	4.10	3.57	3.52
Kota Serang	5,7	5,92	5,7	6.28	5.58	5.57
Kota Tangerang Selatan	1,33	1,75	1,68	1.69	1.67	1.76

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 70,29 persen. Sementara kelompok komoditi non makanan hanya menyumbang 29,71 persen terhadap Garis Kemiskinan.

Berdasarkan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan tersebut, pencapaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten belum menciptakan peluang ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif (inclusive growth). Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang inheren, berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Pertumbuhan inklusif menunjukkan

pertumbuhan yang berkualitas, yang memungkinkan seluruh individu ikut berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan yang berkualitas diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan memperbesar ketersediaan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas bila semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ekonom mendorong kemitraan yang mapan antara pemerintahan daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha dalam mengelola sumber daya lokal yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memicu pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tertentu.

Pertumbuhan yang inklusif tergantung dari tiga komponen penting: keberhasilan memaksimalkan kesempatan atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat; ketersediaan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat; dan keberhasilan menjamin keadilan akses terhadap kesempatan kerja. Ketiga komponen dasar dari pembangunan yang inklusif sangat tergantung pada aspek institusi dan tata kelola.

Untuk memaksimalkan kesempatan atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam memperkuat ekonomi lokal, Nancey Green Leigh dan Edward J. Blakely dalam *Planning Local Economic Development: Theory and Practice* (2016) merumuskan beberapa kriteria, yaitu: 1) Bahan baku dan sumber daya lokal; 2) Dapat digerakan oleh penduduk lokal/ sesuai dengan kemampuan penduduk (SDM) lokal; 3) Pengusaha dan tenaga kerja dominan adalah tenaga kerja lokal; 4) Melibatkan sebagian besar penduduk lokal; 5) Skala pelayanan kecil ditunjukkan oleh jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja; 6) Terdapat organisasi/ kelompok kegiatan ekonomi; 7) Terdapat keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain; 8) Memunculkan wirausahawan baru. Pengembangan dunia usaha yang berbasis potensi local merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan dunia usaha dianggap sebagai cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses perubahan kualitas diri manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Adapun kemajuan pembangunan manusianya secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri adalah ukuran yang mencerminkan capaian kemajuan pembangunan manusia, yang dibentuk menurut tiga dimensi dasar kebutuhan manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Angka IPM berdasarkan kabupaten/kota di provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.26
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2012 – 2017

Kab/Kota	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Pandeglang	61,35	62,06	62,72	63,40	63,82
Kabupaten Lebak	61,13	61,64	62,03	62,78	62,95
Kabupaten Tangerang	69,28	69,57	70,05	70,44	70,97
Kabupaten Serang	63,57	63,97	64,61	65,12	65,60
Kota Tangerang	75,04	75,87	76,08	76,81	77,01
Kota Cilegon	70,99	71,57	71,81	72,04	72,29
Kota Serang	69,69	70,26	70,51	71,09	71,31
Kota Tangerang Selatan	78,65	79,17	79,38	80,11	80,84
Provinsi Banten	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42
Indonesia	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.11
Perkembangan IPM Provinsi Banten 2011-2017

IPM Banten sendiri pada tahun 2017 ini baru mencapai 71,42. Berarti, jaraknya dari yang ideal masih kurang 28,58 persen. Adapun status pembangunan manusianya masih tetap berkategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Betapapun juga, dengan angka IPM sebesar itu, capaian pembangunan manusia Banten berada pada peringkat tertinggi ke delapan di Indonesia. Pada tahun 2017, IPM Banten telah mencapai 71,42, atau meningkat 0,46 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 70,96. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2017 mengalami perlambatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,65 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 0,98 persen.

2.2.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah tidak terlepas dari pendidikan yang merupakan penentu kualitas penduduk. Kualitas penduduk Banten sendiri selama tiga tahun terakhir ini telah meningkat pesat. Kondisi ini dapat diketahui dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS) dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT), hingga mencapai 8,37 tahun dan 6,39 persen. Bahkan, kualitas penduduk Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan Nasional, yang memiliki RLS dan APT hanya 7,95 tahun dan 5,96 persen.

Tabel 2.27
Rata rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	6,44	6,45	6,60	6,62	6,63	6,72
Kab Lebak	5,81	5,84	5,86	6,19	6,20	6,21
Kab Tangerang	8,18	8,2	8,22	8,23	8,24	8,27
Kab Serang	6,65	6,69	6,90	6,98	7,17	7,18
Kota Tangerang	9,82	10,2	10,20	10,28	10,29	10,51
Kota Cilegon	9,6	9,66	9,67	9,68	9,69	9,73
Kota Serang	8,56	8,58	8,59	8,6	8,61	8,62
Kota Tangerang Selatan	11,48	11,56	11,57	11,58	11,77	11,78
Provinsi Banten	8,17	8,19	8,27	8,37	8,53	9,62

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Rata rata lama sekolah Provinsi Banten pada tahun 2013 adalah 8.17, angka pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 36 poin atau 8,53. Selama periode 2013 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah telah meningkat sebesar 1,45 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah juga menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan di Banten. Kondisi ini sekaligus menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang bersekolah. Sayangnya, angka pertumbuhan Harapan Lama Sekolah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, inilah yang harus dicari jalan keluarnya. Betapapun juga, Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 telah mencapai 12,78 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2017, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester I di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SMA.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2018 telah mencapai 9,62 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III).

Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam setahun terakhir ini, kualitas pendidikan penduduk Banten meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2.8 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia a pada tahun t . Harapan Lama sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.28
 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten
 Tahun 2012 – 2018

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	12.17	12.86	13.38	13.39	13.40	13.41	13,42
Kab Lebak	10.96	11.55	11.88	11.90	11.91	11.92	11,93
Kab Tangerang	11.18	11.44	11.65	11.89	12.11	12.51	12,80
Kab Serang	11.72	12.09	12.35	12.36	12.37	12.38	12,39
Kota Tangerang	12.23	12.60	12.86	12.90	13.41	13.44	13,83
Kota Cilegon	12.18	12.67	13.07	13.10	13.11	13.12	13,13
Kota Serang	11.82	11.92	12.34	12.36	12.63	12.64	12,65
Kota Tangerang Selatan	12.79	13.24	13.58	13.61	14.08	14.390	14,42
Provinsi Banten	11.79	12.05	12.31	12.35	12.70	12.78	12,85

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Berdasarkan tabel tersebut, Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Banten pada Tahun 2018 adalah sebesar 12,85 Tahun, dengan kecenderungan selalu meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2012 dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,06%. Angka indikator HLS tersebut mengindikasikan bahwa anak usia 7 tahun di Provinsi Banten mempunyai peluang untuk bersekolah selama 12,85 tahun, atau sampai dengan lulus sekolah menengah. Dalam wilayah Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan mencapai angka HLS tertinggi, yaitu 14,42 tahun dan Kabupaten Lebak menunjukkan angka HLS terendah, yaitu 11,93 tahun.

2.2.9 Angka Harapan Hidup

Capaian Banten untuk bidang kesehatan dalam tiga tahun terakhir telah menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi ini terlihat dari terus meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) hingga mencapai 69 tahun lebih 64 bulan pada tahun 2018. Selain itu, angka kesakitan yang diukur dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurun hingga menjadi 28,30 persen. Sayangnya, rata-rata lama sakit dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan justru meningkat dari sekitar 5 hari menjadi 6 hari.

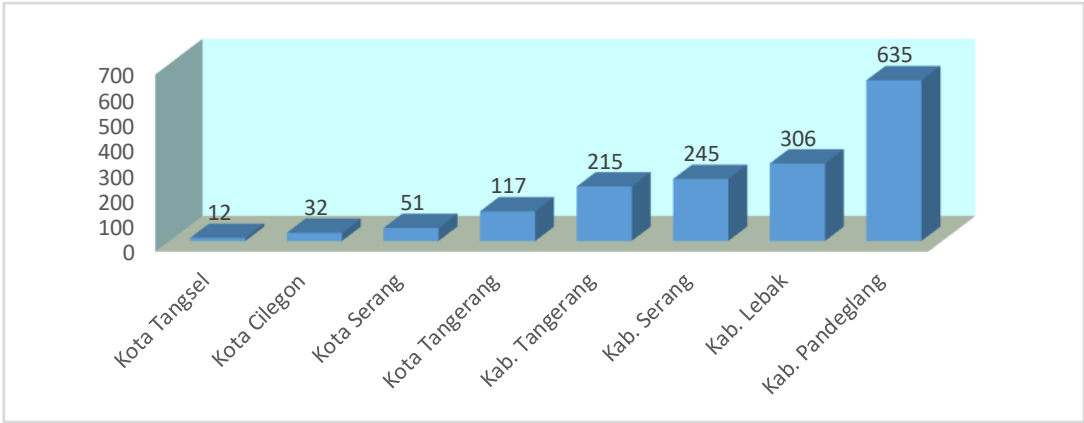
Tabel 2.29
Angka Harapan Hidup Tahun 2013 – 2018

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	62,83	62,91	63,51	63,77	64,04	64,24
Kab Lebak	65,83	65,88	66,28	66,43	66,59	66,79
Kab Tangerang	68,96	68,98	69,28	69,37	69,47	69,61
Kab Serang	63,03	63,09	63,59	63,81	64,02	64,22
Kota Tangerang	71,09	71,09	71,29	71,34	71,38	71,45
Kota Cilegon	65,84	65,85	66,15	66,24	66,32	66,43
Kota Serang	67,23	67,23	67,33	67,36	67,38	67,58
Kota Tangerang Selatan	72,1	72,11	72,12	71,14	72,16	72,26
Provinsi Banten	69,04	69,13	69,43	69,46	69,49	69,64

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

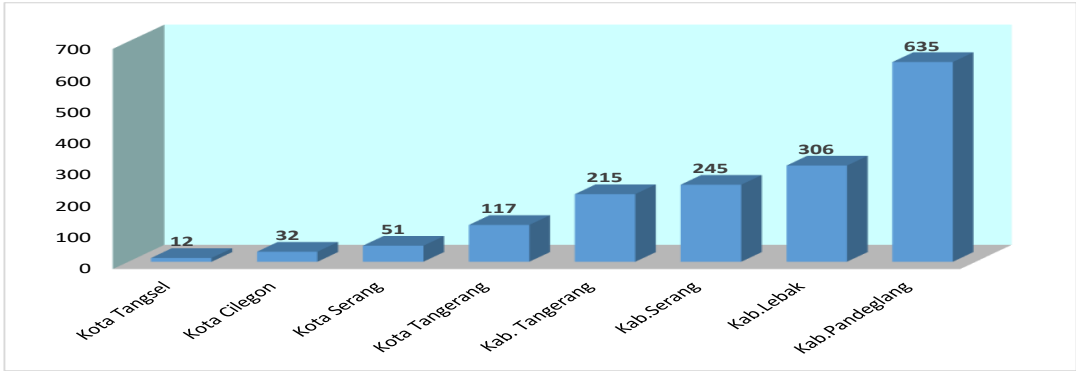
2.2.10 Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus gizi buruk di Provinsi Banten Tahun 2015 masih cukup tinggi terutama di Kabupaten Pandeglang sebesar 635 kasus dan kabupaten Lebak sebesar 306 kasus, hal ini perlu penanganan secara komprehensif dengan melibatkan lintas sektor terkait.



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.12
Jumlah Gizi Buruk 2018

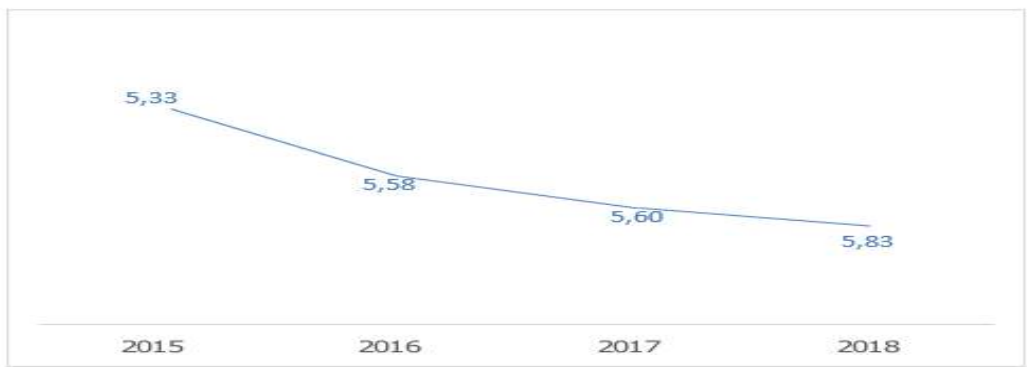


Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.13
Jumlah Gizi Buruk Ditangani/ Dirawat 2018

2.2.11 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja Banten (penduduk usia 15 tahun ke atas), yang memasuki pasar kerja telah meningkat hingga menjadi lebih dari dua pertiganya. Kondisi ini terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang memberikan gambaran mengenai besarnya persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam bagian angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Banten sendiri selama periode 2015 sampai dengan Agustus 2018 tersebut terus bertambah, yaitu dari 5,33 juta orang menjadi 5,83 juta orang.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018
Gambar 2.14
Angka partisipasi angkatan kerja (Dalam Juta)

2.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga mengalami kenaikan dari 62,32 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 63,50 persen pada tahun 2018. TPAK sebesar 63,50 persen berarti dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 63 hingga 50 orang yang aktif secara ekonomi. TPAK sebesar 63,66 persen berarti dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 63 hingga 50 orang yang aktif secara ekonomi.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018
Gambar 2.15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten (Persen)
Tahun 2012-2018

2.2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di perkotaan lebih rendah dibanding yang di perdesaan, yaitu 7,62 persen berbanding 10,77 persen. Keadaan ini dimungkinkan karena lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia di perkotaan dibanding di perdesaan, sehingga penyerapan angkatan kerja dalam dunia kerja di perkotaan lebih tinggi dan tingkat pengangguran pun rendah.

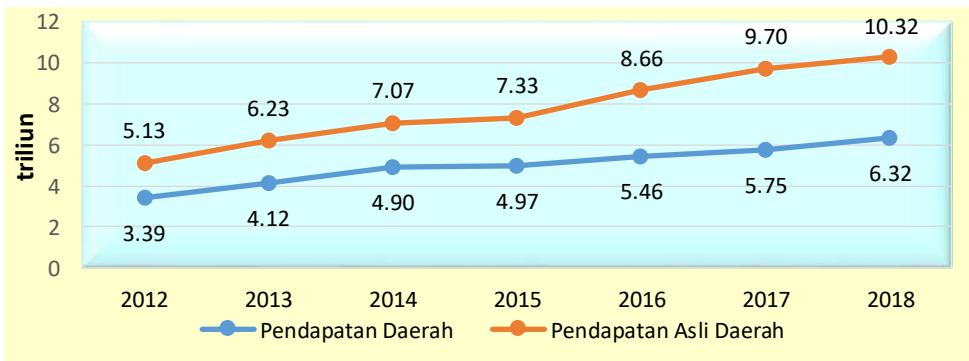


Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten
Tahun 2012-2018 (Persen)

2.2.14 Persentase PAD terhadap Pendapatan

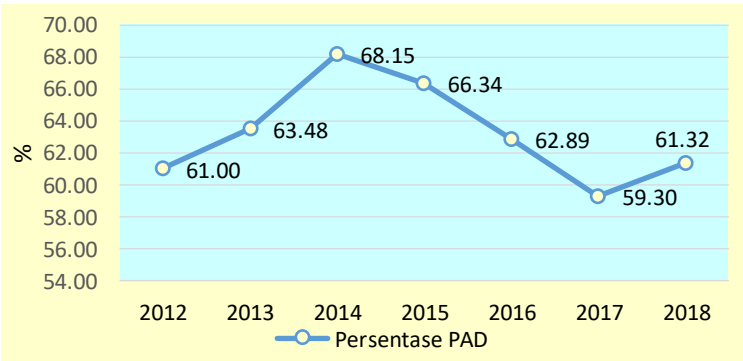
Perkembangan APBD Provinsi Banten tahun 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah berada pada kisaran 12,5%, pendapatan daerah pada tahun 2012 sebesar Rp5,13 triliun terus bergerak naik hingga pada tahun 2016 sebesar Rp8,66 triliun. Pertumbuhan tersebut memberikan gambaran yang sangat baik terhadap peningkatan pendapatan daerah. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 12%. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 masih sebesar Rp. 3,39 triliun dan menjadi Rp6,32 triliun pada tahun 2018. Realisasi perkembangan dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.17
Realisasi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Banten Tahun 2012-2018

Selanjutnya komposisi pendapatan daerah tahun 2012-2016 secara signifikan di dominasi oleh Pendapatan Asli Daerah yang mencapai kisaran 61,00 persen sampai dengan 61,32 persen. Komposisi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.18
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2012-2018

2.2.15 Pertumbuhan Industri

Industri pengolahan adalah satu-satunya lapangan usaha yang setiap tahun selalu mendominasi struktur perekonomian Banten. Jumlah perusahaan atau usahanya pada tahun 2016 mencapai 129 ribu unit, atau bertambah 10 ribu unit dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, penyerapan tenaga kerjanya justru menurun dari 1,2 juta orang menjadi 1,1 juta orang. Akan tetapi, NTB yang diciptakannya meningkat hingga mencapai angka 168,4 triliun rupiah. Akibatnya, NTB per tenaga kerja juga meningkat dari 133,9 juta rupiah menjadi 150,8 juta rupiah.

Secara spasial, industri pengolahan Banten terkonsentrasi di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan bagian timur Kabupaten Serang dengan teknologi produksi kebanyakan padat tenaga kerja. Kemudian, Kota Cilegon dan bagian barat Kabupaten Serang yang menjadi daerah konsentrasi industri padat modal. Secara keseluruhan persentase jumlah perusahaan, tenaga kerja dan NTB industri pengolahan untuk keempat Kabupaten/Kota tersebut terhadap total Banten mencapai 93,6 persen, 78,0 persen dan 93,4 persen.

Adanya perbedaan teknologi produksi antar perusahaan/usaha industri pengolahan, secara agregat dapat dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerja, yang dalam hal ini diukur dengan NTB per tenaga kerja. Dimana, tingkat produktivitas tenaga kerja industri padat modal akan lebih tinggi dibandingkan yang padat tenaga kerja. Dengan melihat besaran NTB

per tenaga kerja, dapat dikatakan bahwa industri pengolahan yang ada di Kota Cilegon relatif paling padat modal dibandingkan daerah lain di Banten. Adapun yang paling padat tenaga kerja adalah industri pengolahan yang terletak di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.30
Statistik Industri Pengolahan Banten Tahun 2016-2017

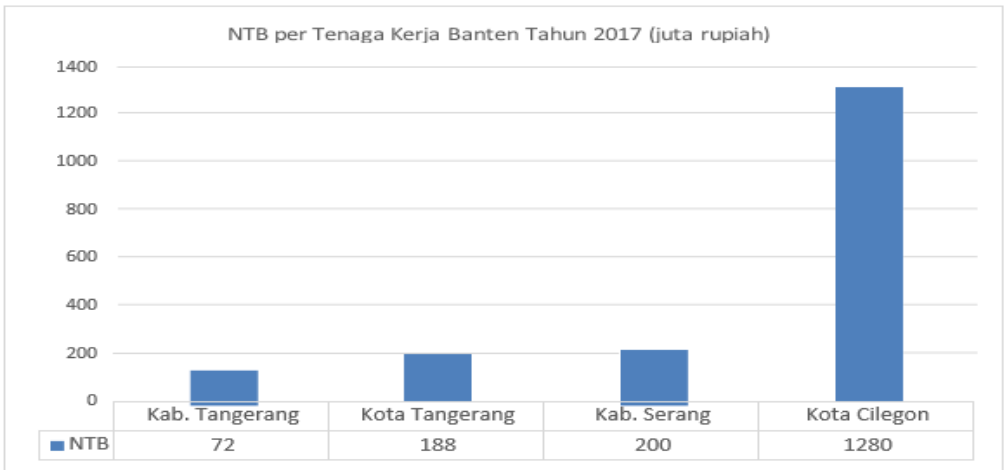
URAIAN	2016	2017
Perusahaan/Usaha (Ribuan Unit)	113	108
Tenaga Kerja (Orang)	1.117	1.246
Nilai Tambah Bruto (NTB, Triliunan Rp)	168,7	180,0
NTB per Tenaga Kerja (Juta Rp)	151,0	144,4

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.31
Distribusi Spasial Industri Pengolahan Banten (persen) Tahun 2017

URAIAN	PERUSAHAAN	TENAGA KERJA	NTB
Kabupaten Tangerang	40,6	48,9	24,2
Kota Tangerang	34,3	19,3	24,9
Kabupaten Serang	9,9	12,8	17,6
Kota Cilegon	4,2	3,1	27,0
Kabupaten/Kota Lainnya	11,0	15,9	6,3

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.19
NTB per Tenaga Kerja Banten (juta rupiah) Tahun 2017



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.20
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Provinsi Banten
Tahun 2012-2015